

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai bagaimana “Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Desa Sumodikaran dalam perspektif *Good Governance*”. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pengelolaan BKKD untuk pembangunan jalan poros desa di Desa Sumodikaran, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut.

1. Transparansi pengelolaan BKKD

Transparansi baru mencapai tahap prosedural, belum substantif. Instrumen formal seperti *banner* pengumuman, papan informasi proyek, dan forum Musdes sudah tersedia, namun keempat variabel dalam transparansi UNDP belum terpenuhi secara memadai: distribusi informasi tidak merata secara geografis sehingga warga Dusun Tempuran tidak mendapat informasi resmi; hambatan kultural berupa budaya sungkan dan disparitas akses berdasarkan posisi sosial menjadi penghalang nyata aksesibilitas; dokumen teknis seperti RAB, APBDesa Perubahan, RKP Desa, dan BKU yang mencatat 29 transaksi tidak dapat diakses publik sehingga masyarakat tidak memiliki instrumen verifikasi mandiri; serta sosialisasi tatap muka yang merata tidak pernah dilakukan. *Website* resmi

desa tidak memuat informasi terkini tentang BKKD, padahal platform ini merupakan saluran transparansi yang paling efisien dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

2. Akuntabilitas pengelolaan BKKD

Akuntabilitas berpola asimetris: kuat pada dimensi vertikal, cukup aktif namun tidak terlihat pada dimensi horizontal, dan masih sangat lemah pada dimensi sosial. Akuntabilitas vertikal kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berjalan baik: laporan disampaikan tepat waktu melalui Siskeudes, penyerapan anggaran mencapai 99,8 persen dari RAB (realisasi Rp1.741.324.270,16 dari RAB Rp1.744.635.360,00), dan konsistensi perencanaan antara Matrix RPJMDes dan BKU terjaga. Akuntabilitas horizontal melalui BPD berjalan aktif dengan kunjungan lapangan dan permintaan dokumen formal, namun hasilnya tidak dikomunikasikan kepada masyarakat sehingga tidak berkontribusi pada kepercayaan publik. Akuntabilitas sosial merupakan titik terlemah: LPJ ditolak aksesnya dengan alasan privat, yang secara langsung bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; BKU yang kaya data tidak dikenal oleh masyarakat umum; dan ketiadaan mekanisme pengaduan yang terstruktur melemahkan prinsip *enforceability*.

3. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BKKD

Partisipasi baru bersifat prosedural, belum substantif. Proses perencanaan sudah melalui Musrenbangdes, Musrenbangcam, dan penetapan APBDesa dengan program jalan poros desa tercantum dalam Matrix RPJMDes sebagai item nomor 74, namun keterlibatan yang bermakna belum terwujud pada empat unsur partisipasi UNDP. Warga Dusun Tempuran tidak mendapat undangan langsung dan tidak pernah mendapat sosialisasi yang disengaja; perempuan hadir secara fisik dalam forum namun tidak aktif berbicara; dan pemuda tidak dilibatkan sama sekali. Susunan Timlak dalam SK Kepala Desa Nomor 188/31/KEP/412.414.12/2025 tidak memuat unsur masyarakat, dan tidak ada satu pun tugas Timlak yang mewajibkan fasilitasi partisipasi warga. Sosialisasi sebelum forum tidak dilaksanakan sehingga partisipasi berlangsung tanpa bekal informasi yang memadai. Tidak ada satu pun informan masyarakat yang pernah dilibatkan secara resmi dalam pemantauan fisik proyek.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Desa Sumodikaran

Pemerintah Desa Sumodikaran perlu segera mempublikasikan dokumen pertanggungjawaban BKKD secara terbuka melalui *website* resmi desa, papan pengumuman di setiap dusun, dan grup *WhatsApp* warga. Pada

siklus BKKD berikutnya, sosialisasi tatap muka di setiap dusun harus dilaksanakan sebelum Musrenbangdes, undangan tertulis langsung disampaikan kepada seluruh warga Dusun Tempuran, unsur masyarakat perlu dimasukkan dalam susunan Timlak dengan tugas eksplisit memfasilitasi informasi dan pengawasan oleh warga, serta saluran pengaduan yang mudah diakses dan aman perlu dibangun.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

DPMD Kabupaten Bojonegoro perlu merancang program *capacity building* terfokus pada komunikasi publik, fasilitasi partisipasi inklusif, dan pengelolaan informasi digital bagi aparatur desa. Perbup tentang BKKD perlu diperkuat dengan klausul yang secara eksplisit mewajibkan publikasi ringkasan dokumen melalui minimal dua saluran, sosialisasi per dusun, keterlibatan unsur masyarakat dalam Timlak, dan penyediaan mekanisme pengaduan. Inspektorat disarankan memperluas cakupan pemeriksaan pada aspek transparansi informasi publik dan kualitas partisipasi masyarakat, tidak hanya aspek administratif-keuangan.

3. Bagi Masyarakat Desa Sumodikaran

Masyarakat Desa Sumodikaran, khususnya pemuda, kader Karang Taruna, dan anggota PKK, diharapkan semakin aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan desa. Masyarakat perlu memahami bahwa mereka berhak meminta dokumen pertanggungjawaban BKKD berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik, dan hak ini tidak perlu mereka rasa sungkan untuk digunakan.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan pendekatan *mixed method* yang menggabungkan data kualitatif dengan survei kuantitatif terhadap seluruh kepala keluarga di Desa Sumodikaran. Penelitian komparatif antara Desa Sumodikaran dan desa penerima BKPD lainnya di Kecamatan Dander atau Kabupaten Bojonegoro akan memungkinkan identifikasi praktik terbaik yang dapat direplikasi. Kajian tindak lanjut pada siklus BKPD berikutnya juga akan memungkinkan evaluasi atas implementasi rekomendasi penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I. G. N. O., Agung, I. G., Yuliartika, A., & Sumawidayani, N. (2025). Implementasi Sistem Informasi Keuangan Desa Adat (SIKUAT) dalam mewujudkan *good local governance*. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 16, 140–146.
- Azizah, N., Suaidah, I., & Niam, M. A. (2022). Analisis penerapan *tax planning* atas dana BKD (Bantuan Keuangan Desa) khusus pengaspalan jalan guna meminimalisir beban fiskal di Desa Nglajang Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 7(3), 82–94.
- Fardani, R., Kartiko, S. W., & Heny, W. (2023). Inovasi pengelolaan bantuan keuangan: Reformasi dan reformulasi pengalokasian bantuan keuangan bersifat khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa (Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Pati). *JAB*, 9(2), 142–152.
- Hestanto, R. W., & Pradana, G. W. (2025). Efektivitas program Bantuan Keuangan Khusus Desa dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat (Studi kasus di Desa Banjarpanjang Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan). *Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*, 6(1).
- Hisana, W. N., Sari, P. N., Zahra, A. N., & Diniati, B. T. (2026). Efektivitas program pembangunan infrastruktur jalan di Desa Betak Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 6(1).
- Luhung, T. A., Setyawan, A., & Handayani, D. (2024). Efektivitas Bantuan Keuangan Desa (BKD) untuk rehabilitasi jalan di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, 2(2), 41–48.
- Maulana, N., & Hakib, A. (2026). Implementasi kebijakan Dana Desa bagi pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 13(2), 596–600.
- Ngadha, F. D., Mone, A. L., & Asdiani, P. A. (2024). Efektivitas penggunaan anggaran Dana Desa terhadap infrastruktur jalan di Desa Merbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(4), 1170–1182.
- Putra, F. P., Salsabila, N., & Kurniawan, S. (2023). Program Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Bengkalis. *Bhakti Nagori*, 3(74), 205–211.
- Swasanti, I., [penulis lain dilengkapi]. (2022). Optimalisasi pengelolaan APBDes dalam peningkatan pembangunan infrastruktur di Desa Margomulyo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. *JIAN: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 6(1), 25–32.
- Wahyudi, D. P. (2025). Implementasi program Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk pemberdayaan BUM Desa dari Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Kediri. *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(1), 446–454.
- Hasibuan, M. S. P. (2016). *Manajemen: Dasar, pengertian, dan masalah* (Rev. ed.). Bumi Aksara.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Siagian, S. P. (2014). *Fungsi-fungsi manajerial* (Rev. ed.). Bumi Aksara.
- Terry, G. R., & Rue, L. W. (2010). *Dasar-dasar manajemen* (Terjemahan G. A. Ticoalu). Bumi Aksara.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. UNDP.
- Desa Sumodikaran. (2020). *Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Sumodikaran Tahun 2021–2026*. Ditetapkan pada 30 Juli 2020. Pemerintah Desa Sumodikaran, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro.
- Desa Sumodikaran. (2025). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Sumodikaran Tahun Anggaran 2025: Perubahan Rencana Anggaran Biaya*. Ditetapkan pada 3 Oktober 2025; dicetak melalui Siskeudes tanggal 17 November 2025. Pemerintah Desa Sumodikaran, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro.
- Desa Sumodikaran. (2025). *Buku Kas Umum (BKU) Sumber Dana Pembantuan Khusus (PBK) Tahun Anggaran 2025*. Ditetapkan pada 6 Februari 2026; dicetak melalui Siskeudes tanggal 25 Februari 2026. Pemerintah Desa Sumodikaran, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro.
- Desa Sumodikaran. (2025). *Dokumentasi foto kegiatan pembangunan Jalan Poros Desa Sumodikaran Tahun Anggaran 2025*. Pemerintah Desa Sumodikaran, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro.
- Desa Sumodikaran. (2025). *Keputusan Kepala Desa Sumodikaran Nomor 188/31/KEP/412.414.12/2025 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Poros Desa Sumodikaran Tahun Anggaran 2025*. Ditetapkan pada 11 Agustus 2025. Pemerintah Desa Sumodikaran, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro.
- Desa Sumodikaran. (2025). *Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Jalan Desa Sumodikaran Kecamatan Dander Tahun Anggaran 2025*. Disahkan oleh Kepala Desa Sumodikaran; disusun oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan. Pemerintah Desa Sumodikaran, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro.
- Desa Sumodikaran. (2025). *Rencana Kerja Kegiatan Desa Tahun 2025*. Ditetapkan pada 16 Mei 2025; dicetak melalui Siskeudes. Pemerintah Desa Sumodikaran, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro.
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2014a). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan*

- Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Sekretariat Negara.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Kementerian Dalam Negeri.
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2024a). *Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro*. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2024b). *Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2024 tentang Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2025*. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- Infopublik. (2024). BKKD Rp 608 miliar, Pemkab Bojonegoro perkuat pembangunan desa. Infopublik. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/938932/bkkd-rp608-miliar-pemkab-bojonegoro-perkuat-pembangunan-des>
- Kabar Pasti. (2026, 19 Januari). Simak! BKKD 16 desa di Kecamatan Dander Bojonegoro tahun 2026. Kabar Pasti. <https://kabarpasti.com/simak-bkkd-16-des-di-kecamatan-dander-bojonegoro-tahun-2026/>
- Pena Desa. (2025, 24 November). Program BKKD Dander capai 60%, 16 desa nikmati bantuan pembangunan. Penadesa.id. <https://penadesa.id/program-bkkd-dander-capai-60-16-des-nikmati-bantuan-pembangunan/>
- Pemerintah Desa Sumodikaran. Website resmi Pemerintah Desa Sumodikaran Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. <https://sumodikaran-bjn.desa.id/>
- Radar Bojonegoro. (2024). 46 desa di Bojonegoro terima BKK, jalan Desa Napis cair Rp3 miliar. Radar Bojonegoro. https://radarbojonegoro.jawapos.com/bojonegoro/716414313/46-des-di-bojonegoro-terima-bkk-jalan-des-napis-cair-rp-3-miliar#google_vignette